JURNAL TEOLOGI GRACIA DEO
e-ISSN 2655-6863
Volume 5, No. 1, Juli 2022 (60-74)
http://e-journal.sttbaptisjkt.ac.id/index.php/graciadeo

Refleksi Galatia 5:14 tentang Moderasi Beragama: Sebuah Keniscayaan dalam Merajut Kembali Kesatuan Bangsa

Helen Farida Latif[1], J. Musa Tannia Pangkey[2], Tunggul Yulianto[3]
[1,2,3]Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa, Jakarta
Correspondence: helenpangkey97@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.46929/graciadeo.v5i1.112

Abstract: Reweaving unity amid the fact of differences in a multicultural society like Indonesia is a difficult and challenging job, but it is also a necessity that must be done. Cases of violence in carrying out religious beliefs often occur in human life in various regions in this hemisphere. The practice of violence in the name of religion can be a polluting and deadly poison for a safe and peaceful life in society and a very dangerous threat to the integrity and unity of the nation. To reweaving the nation's unity which has experienced shocks of division, injustice, and apathy of citizens who feel they are considered a minority, religious moderation is a necessity and the best answer for re-establishing national unity and integrity that has suffered damage related to the practice of violence in the name of religion. This study uses a qualitative approach to the factual issue of increasing acts of religious violence and intolerance in various regions in Indonesia. The use of descriptive methods with literature related to religious moderation and biblical views in Galatians 5:14 provides a clear picture of the teaching of the love of the Lord Jesus Christ through the Apostle Paul to the Galatians and is expected to be a pattern for the nation's children in doing moderation. religion in order to reweave the unity of the nation in the midst of diversity and difference.

Keywords: Galatians 5:14, national unity, religion, religious moderation

Abstrak: Merajut kembali sebuah kesatuan di tengah fakta perbedaan dalam masyarakat multi-kultural seperti di Indonesia merupakan sebuah pekerjaan sulit dan penuh tantangan, namun juga merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Kasus-kasus kekerasan dalam menjalankan keyakinan beragama kerapkali terjadi dalam kehidupan manusia di berbagai wilayah di belahan bumi ini. Praktik kekerasan atas nama agama dapat menjadi racun yang mencemarkan dan mematikan bagi kehidupan yang aman dan damai dalam masyarakat dan merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi keutuhan dan kesatuan bangsa. Untuk merajut kembali kesatuan bangsa yang telah mengalami goncangan perpecahan, ketidakadilan, dan keapatisan warga negara yang merasa dianggap minoritas, maka moderasi beragama merupakan sebuah keniscayaan dan jawaban terbaik bagi penegakan kembali kesatuan dan persatuan bangsa yang telah mengalami kerusakan yang diakibatkan praktik kekerasan atas nama agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada persoalan faktual meningkatnya tindakan kekerasan beragama dan intoleransi di berbagai wilayah di Indonesia. Penggunaan metode deskriptif dengan literatur ter-kait moderasi beragama dan pandangan Alkitab dalam Galatia 5:14 untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengajaran kasih Yesus melalui Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia dan diharapkan dapat menjadi pola bagi anak bangsa negeri ini dalam melakukan moderasi beragama guna merajut kembali kesatuan bangsa di tengah kemajemukan dan perbedaan.

Kata kunci: agama, Galatia 5:14, kesatuan bangsa, moderasi beragama

Pendahuluan

Perbedaan di tengah keberagaman merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dan lazim terjadi di manapun di dunia ini, termasuk perbedaan dalam kepercayaan/agama. Masyarakat yang hidup dalam komunitas dengan perbedaan yang beragam namun tetap dapat hidup dalam kerukunan dan kesatuan merupakan suatu berkat anugerah yang berharga. Sejak Indonesia merdeka, tidak sedikit tantangan perpecahan terjadi, namun para bapak bangsa (*founding fathers*) kita telah memberikan contoh nyata bahwa mereka tetap dapat hidup berdampingan dan saling menghormati sepanjang berpuluh-puluh tahun ini.

Dalam dekade terakhir ini hidup dalam kerukunan dan kesatuan yang damai itu mulai terusik dengan munculnya orang-orang atau kelompok-kelompok yang berhasrat merusak nilai-nilai luhur bangsa ini dengan berbagai cara dan perilaku. Berbagai konflik dalam masyarakat, terutama konflik terkait kebebasan beragama telah tercipta seolah tak terkendali lagi. Perbedaan agama telah dijadikan sebagai isu pemicu yang paling potensial bagi terjadinya kekerasan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, bahkan Indonesia telah digambarkan menjadi salah satu kawasan di dunia yang paling produktif dalam memroduksi aneka kisah tragis terkait kekerasan atas nama agama dan telah menempatkan negeri ini sebagai ”perpustakaan” maha luas yang menyimpan arsip berbasis pengalaman diri mengenai berbagai variasi kekerasan yang menjadikan agama sebagai pembenar.[1] Perbedaan dalam keragaman yang dulunya begitu damai kini hanya merupakan impian masa kecil yang semu dan telah dijadikan alasan untuk membuat kekacauan dan kerusakan di berbagai wilayah di negara ini. Para pelakunya umumnya adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang merasa dan memahami diri, kelompok, dan ajarannya adalah yang paling benar, bahwa memahami dan menafsirkan doktrin agama yang kurang tepat merupakan bentuk nyata dari penyebab alasan agama melegitimasi kekerasan, dan gambaran tentang keadaan dan kondisi tertentu di mana kekerasan menjadi boleh dilaksanakan, menunjukkan pada keruwetan tingkatan pemahaman tentang legitimasi; bahkan, ketidakjelasan itu justru dalam praktiknya sering membuat penyelewengan-penyelewengan.[2] Dalam pandangan Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman, pendapat ini bahkan sudah menjadi keyakinan bagi sebagian dari mereka, pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehansif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain.[3]

Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya, dan bahwa setiap orang mestinya diberikan kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan

[1] Cornelis Lay, *"Kekerasan atas Nama Agama: Perspektif Politik"* JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No. 1 (Juli 2009) 4.

[2] Ahmad Isnaeni, *"Kekerasan atas Nama Agama"* KALAM Jurnal Faculty IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8, No. 2 (2014) 218.

[3] R. Amin, "*Prinsip dan fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi hukum Islam*" Jurnal Al-Qalam, Vol. 20 (2014) 23.

dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya.[4] Namun demikian, tak dapat disangkal, bahwa kasus kekerasan beragama cenderung dilakukan kelompok-kelompok yang merasa mayoritas dan merasa benar dengan menyasar kelompok minoritas dan dianggap berbeda, dengan penggunaan kekerasan berlebih serta dipicu atas dasar kebencian terhadap suatu kelompok agama.[5] Pada kenyataannya, kekerasan-kekerasan atas nama agama masih sering terjadi di negeri ini, beberapa fakta kekerasan beragama ini akan diuraikan pada bagian pembahasan penelitian ini.

Merajut kembali kesatuan bangsa yang telah mengalami kerusakan, perpecahan, ketidakadilan, dan keapatisan warga negara yang dianggap minoritas dan i*nferior*, maka moderasi beragama, terutama bagi mereka yang merasa dan memahami diri mereka adalah mayoritas dan *superior* pemilik kekuasaan atas negeri ini merupakan sebuah keniscayaan, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa yang telah mengalami kesuraman terkait kekerasan agama dan intolerasi yang keras dapat tegak kembali dengan kokoh. Tulisan ini tidak bermaksud menyakiti siapa pun atau untuk mengorek luka lama masa lalu atau untuk mencari-cari kesalahan institusi/kelompok/golongan mana pun atau siapa pun, melainkan menawarkan keniscayaan moderasi beragama yang dikaitkan dengan fakta kekerasan atas nama agama agar semua anak bangsa dapat merenungkan dan mengambil sikap serta tindakan yang bijaksana guna menangkal kekerasan beragama dan merajut kembali kesatuan bangsa, sehingga setiap masyarakat beragama di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai. Dari beberapa penelitian yang diuraikan di atas terkait moderasi beragama, peneliti melihat beberapa solusi yang ditawarkan masih terfoukus pada ajaran kelompok agama tertentu saja, dan menurut pandangan peneliti selayaknya tersedia juga kesempatan bagi kelompok atau agama yang dianggap minoritas untuk memberikan sumbangsih terkait praktek pengajaran keagamaannya dengan tanpa disertai kecurigaan berlebihan yang bersinggungan dengan imannya bagi moderasi beragama di negara ini selama sumbangsih pengajaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum, aturan, serta undang-undang negara lainnya.

Penelitian ini membahas tentang sebuah keniscayaan untuk melakukan moderasi beragama dalam merajut kembali kesatuan bangsa, secara lebih spesifik penelitian ini mengkaitkan dengan implementasi pengajaran kasih kepada sesama yang diajarkan Rasul Paulus dalam Galatia 5:14. Implementasi kasih kepada sesama ini dipilih untuk dijadikan fokus masalah yang diamati dan sebagai bahan kajian dengan pertimbangan bahwa implikasi kasih kepada sesama ini jarang atau bahkan belum dibahas dan bahwa kasih kepada sesama merupakan hukum utama kedua dalam kekristenan dan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun di negara ini dan layak untuk coba diterapkan dalam melakukan moderasi beragama guna mengatasi berbagai dampak negatif akibat praktek kekerasan dalam beragama. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah "Bagaimanakah implikasi kasih kepada sesama berdasarkan Galatia 5:14 dalam melakukan moderasi beragama?" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi kasih kepada sesama berdasarkan Galatia 5:14 dalam melakukan moderasi beragama dalam merajut kembali kesatuan bangsa. Temuan dan

[4] J. Casanova, *Public Religions In The Modern World* (Chicago: Chicago University Press, 2008) 87.

[5] http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kekerasan-Atas-Nama-Agama-Tindakan-Fatal-Vonis-Minimal.pdf.:.

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam melakukan moderasi beragama di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada persoalan faktual terkait meningkatnya tindakan kekerasan dalam beragama dan intoleransi di berbagai wilayah di Indonesia. Penggunaan metode deskriptif dengan literatur terkait moderasi beragama dan pandangan Alkitab berdasarkan Galatia 5:14 untuk memberikan gambaran yang jelas terkait dengan pengajaran kasih Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia dan diharapkan dapat menjadi pola (pattern) bagi anak bangsa negeri ini dalam melakukan moderasi beragama guna merajut kembali kesatuan bangsa di tengah kemajemukan dan perbedaan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Moderasi Beragama

Konsep moderasi beragama dicetuskan pertama kali oleh Mentri Agama Republik Indonesia (Menag RI) periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin. Buah pemikiran dari timbulnya moderasi beragama ialah adanya keberagaman agama yang ada pada masyarakat Indonesia, dan sebagai pencetus dari moderasi beragama ini beliau mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof. Amany Lubis dalam rangka mengapresiasi tokoh publik atas dedikasinya kepada bangsa Indonesia.[6] Moderasi beragama didefinisikan Lukman Hakim sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah, selalu betindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama.[7] Moderasi beragama ddefinisikan juga sebagai cara pandang dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (pemahaman agama yang sangat kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang sangat liberal).[8] Dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah sebuah cara pandang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dan melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat, tidak berlebih-lebihan atau ekstem.

Keberagaman dan Praktik Kekerasan Beragama

Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang selayaknya disyukuri dan dihargai oleh setiap elemen masyarakat yang memahami pluralisme. Perbedaan dalam keberagaman pun dapat kita jumpai dalam berbagai ragam suku, bahasa suku, agama, adat istiadat dan budaya. Keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memberikan jaminan bagi setiap warga negara memiliki kebebasan menganut agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Perbedaan dalam keberagaman dalan negara kesatuan secara sederhana dapat kita maknai sebagai perbedaan dalam kesatuan, kesatuan dalam perbedaan. Menhan RI periode 2014-2019, Ryamizard Ryacudu mengingatkan akan pentingnya persatuan dan

[6] https://fasya.iain-samarinda.ac.id/indahnya-kehidupan-bermasyarakat-dengan-moderasi-beragama/ (1 Sept 2020). Dikutip 13 Januari 2022.

[7] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 18.

[8] https://lipipress.lipi.go.id › detailpost › moderasi-beragama/.

kesatuan bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI; persatuan tanpa membedakan asal, suku maupun agama yang dapat menangkal penyebaran paham radikalisme yang terus berupaya merongrong falsafah Pancasila, dan bahwa kita perlu ingat sejarah sejak mulai sumpah pemuda, kesepakatan waktu proklamasi bahwa kita dalam beragam agama, ingat bahwa bangsa Indonesia itu adalah dari Aceh sampai Papua dan bahwa Agama itu adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya dan tugas kita sebagai anak bangsa adalah menjaga NKRI dan keutuhan berbangsa dan beragama, serta agar negara tetap kondusif jangan kita mudah terpancing dan terprovokasi dengan paham-paham yang menyesatkan.[9] Perbedaan dalam kesatuan yang berpuluh-puluh tahun telah menjadi kekuatan bangsa pada sepanjang lebih dari dua dasawarsa terakhir ini mengalami kerusakan dengan sering munculnya penerapan kekerasan atas nama agama dan maraknya perilaku intoleransi terhadap yang dianggap minoritas di berbagai wilayah negeri ini. Keadaan ini bukan saja sangat tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, namun juga sangat mengganggu eksistensi kita sebagai umat ciptaan Allah yang rindu hidup aman dan tenteram.

Kekerasan beragama yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang ekslusif dan ekstrim yang menganggap agama dan kelompok-nyalah yang paling benar, dan inilah yang sering memicu konflik dan memunculkan praktek kekerasan terhadap yang lainnya. Mantan Presiden Indonesia, K.H Abdurahman Wahid pernah mengemukakan bahwa awal muasal konflik agama yang terjadi di Indonesia maupun di dunia Internasional biasanya muncul akibat implikasi pendang-kalan agama yang bersumber dari para pemeluknya. Dalam realitas kehidupan beragama di Indonesia, agama Islam dominan memiliki pandangan yang berperilaku ekstrem (fanatik) dalam pemahaman dan pengalaman beragama yang dikenal dengan kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang menurut Hilmi, kedua kelompok ini tidak akan pernah mampu menjadi rahmat bagi segenap alam.[10]

Beberapa variasi kekerasan agama digambarkan: kekerasan yang berlangsung da-lam ranah agama yang sama, kekerasan yang melibatkan agama yang berbeda, kekerasan satu kelompok agama atas kelompok lain yang melakukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama.[11] Munculnya kekerasan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang mereka anggap berbeda sudah menjadi isue yang senan-tiasa muncul di beberapa wilayah. Kecenderungan melarang orang beribadah, dan bahkan tidak sedikit rumah ibadah agama lain dirusak dan dibakar dengan orang-orang yang ada di dalamnya dianiaya bahkan dibunuh. Tidak mengherankan bila muncul stereotip negatif kepada mereka dan agama mereka karena ketika melakukan praktek kekerasan itu mereka menyebut nama sembahannya, padahal ada sebagian masyarakat yang masih memiliki hati dan jiwa yang nasionalis pun seolah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, bahkan terkesan para penegak hukum pun dapat dikendalikan oleh kelompok mereka itu. Agama yang dimaksudkan untuk menuntun manusia menemukan kebenaran justru oleh kelompok-kelompok tersebut dibawa pada pemahaman yang sempit.

---

[9] https://www.kemhan.go.id/2019/03/16/menhan-pentingnya-menjaga-persatuan-dan-kesatuan-bangsa.html (16 Maret 2019). Dikutip 14 Januari 2022.

[10] Priyantoro Widodo dan Karnawati, *"Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia"* PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 15, No. 2 (2019) 10-11.

[11] Cornelis Lay, *"Kekerasan atas Nama Agama"* 4-5.

Salah satu contoh yang terjadi pada kerusuhan tangal 26 Desember 1996 di Tasikmalaya, yang mana hanya dalam tempo 24 jam ada 15 gereja, 18 kantor polisi, 3 hotel, 6 Bank, 8 pabrik, 7 supermarket, 89 toko dan restoran milik orang Tionghoa dirusak. Penyebabnya sehari sebelum kejadian, seorang kyai dianiaya di kantor polisi. Sebenarnya kedua belah pihak: polisi dan kepala pesantren sepakat menyelesaikan secara damai. Namun esok harinya, santri yang tidak puas mengelar doa, protes di mesjid kemudian dialihkan menjadi aksi unjuk rasa yang menggunakan kekerasan.[12] Selain itu, beberapa fakta kekerasan beragama yang terjadi di Indonesia seperti Konflik antarumat beragama di Aceh[13], Konflik Poso[14], Bom Bali I[15], Konflik Sampang, Konflik Papua, Konflik Tanjung Balai; Kasus FJI di Bantul, Yogyakarta, Kasus penolakan jenazah pasien Corona di Kabupaten Semarang. Dalam bidang politik pun, isu terkait agama senantiasa memantik polemik yang melibatkan kelompok-kelompok yang berlawanan. Beberapa pihak melibatkan agama dalam setiap pertimbangan politik, agama menjadi komoditi bagi tahta politik dengan memunculkan kasus-kasus penistaan dalam perselisihan antartokoh politik.[16]

St. Sunardi menggolongkan kekerasan agama ke dalam tiga tipe: (1) kekerasan intern agama, kekerasan ini biasanya terjadi dalam agama tertentu. Para tokoh agama yang mencoba melakukan kritik internal (sebagai usaha pembaharuan atau purifikasi) harus berhadapan dengan kelompok yang menghendaki status quo. Dari sini muncul kecenderungan radikalisme prograsif dan radikalisme ortodoks yang berujung pada hubungan kekerasan akibat dari kebuntuan komunikasi; (2) kekerasan muncul ketika agama memandang dirinya berada di tengah-tengah masyarakat yang zalim, karenanya agama merasa memiliki tuntutan moral untuk melawannya dengan seruan "jihad"; dan (3) kekerasan muncul ketika agama merasa terancam oleh agama-agama lain. Dalam sejarah, ini merupakan kekerasan agama yang sangat memilukan.[17] Menjaga kesatuan bangsa seharusnya sudah menjadi kesadaran setiap warga negara Indonesia.

Kesatuan bangsa merupakan persyaratan bagi tercapainya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi modal utama untuk mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),[18] yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perda-

[12] Cornelis Lay, *"Kekerasan atas Nama Agama"* 9-10.

[13] Mallia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim, "*Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil*" Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 2, hl. 95-96. Urutan Kejadian: 1979: Pembangunan Gereja Gunung Meriah Diprotes oleh umat muslim dan melahirkan perjanjinan 11 juli dan ikrar bersama 13 oktober 1979; 1995: Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Terjadi pembakaran gerja tetapi berkat bantuan warga api bias dipadamkan; 1998: Kristen GKPPD Sebagian dinding gereja dibakar oleh orang yang tidak dikenal; 2001: Sepuluh gereja ditutup Warga tidak setuju pendirian gereja; 2006: Gereja Kristen Gereja dibakar oleh warga karena tidak setuju rumah dijadikan tempat ibadah; 2015: Gereja GKPPD Satu unit gereja dibakar habis.

[14] Igneus Alganih, "*Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)*" *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2, (2016) 170-171.

[15] https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002.

[16] Winda Wana Utami and Darmaiza Darmaiza, "Hate Speech, Agama, Dan Kontestasi Politik Di Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 113–128.

[17] St. Sunardi, *Keselamatan, Kapitalisme, Kekerasan; Kesaksian atas Paradoks-paradoks*. (Yogyakarta: LKiS. 1996), 172-173.

[18] https://www.tempo.co/tag/kemenkopolhukam (16 Desember 2020). Dikutip 15 Januari 2022.

maian abadi dan keadilan sosial.[19] Selaras penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., bahwa kesatuan bangsa merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan bangsa dan kelangsungan hidup negara, apalagi di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi yang sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang bukan lagi konvensional (fisik) melainkan multidimensional (fisik dan nonfisik), sehingga tanpa adanya kesatuan bangsa, negara tidak akan mampu menghadapi ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, maka oleh karena itu pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dan melakukan berbagai upaya untuk mengukuhkan dan menjaga kesatuan bangsa.[20]

Moderasi Beragama: Keniscayaan dalam Merajut Kembali Kesatuan Bangsa

Di dalam agama manapun, sebenarnya tidak ditemukan asumsi yang membenarkan adanya kekerasan. Agama dan kekerasan adalah dua persoalan yang saling menegasikan dan tidak mungkin dipadukan (konvergensi) dalam satu bentuk pemahaman yang utuh. Agama mengakui kekerasan sebagai perumpamaan dari realitas dunia yang tidak ideal, sarat dengan hawa nafsu dan keberdosaan. Karena itu kekerasan yang secara konstitutif inheren dalam agama justru diarahkan untuk menegasikan realisasi praktik-praktik kekerasan itu sendiri. Kekerasan dalam agama adalah hukuman yang dikenakan untuk anggota komunitas umat yang terbukti tidak mematuhi perintah Tuhan sebagaimana terdapat dalam ajaran agama.[21]

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro berpendapat moderasi beragama menjadi sangat penting karena kecenderungan pengamalan agama berlebihan akan memunculkan pembenaran secara sepihak. Juri menjelaskan, moderasi beragama sebagai salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, menjadi isu yang selalu dihadapi dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang plural dengan banyak agama di dalamnya. Agama harus bisa menjadi perekat bangsa.[22] Moderasi beragama sebagai karakter keagamaan di Indonesia juga ditegaskan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, yang menilai, moderasi beragama merupakan cara beragama yang tidak berlebihan, tidak terlalu jauh ke kanan atau jauh ke kiri. Sehingga, hal tersebut menjadi karakter penting yang berkembang di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, namun moderasi beragama bukan hanya ditunjukkan bagi umat muslim saja, dan bahwa semua agama, baik yang besar dan agama lokal yang tidak ditemukan di tempat lain, perlu mendapat perlindungan sebagai warga negara, setidaknya ada empat hal yang perlu diperkuat dalam moderasi beragama: penguatan komitmen kebangsaan, penguatan toleransi, mengikis paham-paham keagamaan yang radikal, dan membentuk cara beragama yang ramah tradisi. Penguatan-penguatan itu tengah diperjuangkan melalui RPJMN 2020-2024.[23]

---

[19] https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-negara-dalam-pembukaan-uud-1945-yang-wajib-diketahui-baca-selengkapnya-kln.html (6 Juli 2021). Dikutip 15 Januari 2022.

[20] https://www.tempo.co/tag/kemenkopolhukam.

[21] Ahmad Isnaeni, *"Kekerasan atas Nama Agama"* 220.

[22] Harls Evan Siahaan, Munatar Kause, and Fereddy Siagian, "Teologi Hospitalitas: Sebuah Diskursus Konstruktif Agama Merevitalisasi Nilai-Nilai Kemanusiaan," *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 134–143.

[23] https://www.ksp.go.id/moderasi-beragama-upaya-pemerintah-memperkuat-karakter-bangsa.html (4 Mei 2021). Dikutip 14 Januari 2022.

Kebutuhan untuk melakukan moderasi beragama ini menjadi penting sebagaimana diungkapkan oleh Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas, bahwa dalam konteks keragaman Indonesia, sangat diperlukan cara beragama yang moderat dan bahwa keragaman agama sejatinya tidak menjadi masalah yang terlalu perlu untuk dirisaukan. Dengan terciptanya toleransi dan juga kerukunan maka masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan dan hidup bersama secara damai, lanjutnya.[24] Moderasi beragama untuk kerukunan Indonesia sebagai negara yang majemuk memerlukan kebijakan guna memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragam dan amat penting dilakukan agar terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera, aman, damai, bersatu, dan tenteram. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. Toleransi beragama bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan dan juga bukan untuk saling bertukar agama atau keyakinan dengan kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda, namun toleransi di sini lebih kepada interaksi *mu`amalah* atau interaksi sosial antar masyarakat yang memiliki batasan-batasan yang mesti dijaga secara bersama sehingga masing-masing pihak bisa dan mampu untuk mengendalikan diri serta bisa menyediakan ruang unrtuk saling menghormati dan manjaga kelebihan dan keunikan masing-masing tanpa ada rasa takut dan khawatir dalam melaksanakan keyakinannya, inilah esensi dari moderasi beragama dalam bingkai toleransi.[25]

Pancasila sebagai Ideologi dan falsafah negara Indonesia sangat menekankan tercipta dan terpeliharanya kerukunan antarumat beragama.[26] Indonesia di masa lalu telah dianggap berhasil dan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia dalam hal mengelola keragaman budaya dan agama, dan dalam mengharmonisasi keberagaman yang ada di dalam negari ini. Konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil maupun besar memang kerap terjadi, namun Pemerintah beserta rakyat selalu berhasil keluar dari konflik, dan kembali pada kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama, Marshall memperluas cakupan penggunaan konsep modal yang melampaui batas-batas ekonomi, selain modal dalam pengertian material, manusia juga membutuhkan modal lainnya yaitu modal sosial dan modal spiritual. Modal sosial adalah kekayaan yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama, adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan manusia agar lebih bermakna secara substansial, dan meskipun modal sosial dan spiritual tidak berbentuk barang dalam arti ekonomi, tetapi tidak boleh dipandang tidak memiliki manfaat ekonomi, kare-

[24] https://fasya.iain-samarinda.ac.id/indahnya..

[25] https://febi.iain-samarinda.ac.id/2021/08/30/moderasi-beragama-dalam-bingkai-toleransi/. Dikutip 16 Januari 2022.

[26] Piter Randan Bua, David Samiyono, and Tony Christian Tampake, "Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif Dari Sila Kelima Pancasila," *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 5, no. 2 (2019): 109–124, http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/97/71.

na modal sosial memberikan manfaat yang lebih luas daripada bidang ekonomi, demikian juga dengan modal-modal lainnya yang ada dalam suatu komunitas perlu disinergikan dengan modal sosial.[27]

Dalam melakukan moderasi perlu memperhatikan pada target-target yang selama ini telah menjadi mediator atau sumber-sumber tumbuh suburnya praktik-praktik kekerasan atas nama agama dan intoleransi ini; kelompok-kelompok ekstrem yang sedemikian mengkultuskan agama tanpa memperlihatkan tindakan hakikat dari beragama itu sendiri perlu mendapatkan perhatian khusus bagi penerapan moderasi ini. Kelompok-kelompok yang menganggap kepercayaannya paling benar dan merasa paling berkuasa sehingga melakukan tindakan kekerasan dengan memaksa orang lain mengikuti kepercayaannnya, mereka juga perlu diberikan perhatian khusus dan ditargetkan. Setiap kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu telah menindas, memecah belah, dan cenderung merusak dan ingin menghancurkan kesatuan dan keutuhan bangsa harus dimoderasi. Untuk tetap dapat hidup berdampingan dengan harmonis dalam keberagaman yang telah menjadi kekayaan bangsa, kita perlu melakukan moderasi, terutama moderasi beragama! Persatuan dan kesatuan bangsa pun dapat terajut kembali dan terpelihara dengan baik. Sebagian besar umat Kristen di Indonesia sangat meyakini bahwa Pancasila adalah karunia Tuhan yang terbaik bagi bangsa ini, Pancasila dapat menempatkan umat Kristen dan umat beragama lainnya sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristen meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing.[28]

Peran Elemen Bangsa dalam Moderasi Beragama

Agama dapat terperangkap dalam spiral kekerasan ketika agama berada dalam kondisi yang tidak berjarak dengan kekuasaan. Agama akan dengan mudah menjadi justifikasi untuk membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kekuasaan. Kerekatan agama dan institusi agama dengan pusat kekuasaan akan menggiringnya ke dalam titik subordinat yang pada gilirannya agama dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan kekerasan. Kekerasan agama dalam konteks ini, akan berimplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari yang diindikasikan dengan tumbuh suburnya mentalitas kepasrahan, yang dalam dimensi keagamaan, kepasrahan dan penyerahan diri merupakan keutamaan manusia yang lemah di hadapan Sang Penguasa (Tuhan). Namun dalam tataran sosial, kepasrahan dan penyerahan diri ini justru harus ditunjukkan pada penguasa. Dalam perkembangannya mentalitas kepasrahan ini lalu menyuburkan ketidakadilan baru yang disebut budaya paternalistik (kebapakan) dimana segala urusan diserahkan kepada penguasa yang notabene bapak (laki-laki). Dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dikenal ketidakadilan gender yang sering berakibat pada terjadinya kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan.[29] Penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara

[27] Syamsul Arifin. *Studi Agama*.
[28] Kementerian Agama RI, *Moderasi* 29.
[29] Ahmad Isnaeni, *"Kekerasan atas Nama Agama"* 225-226.

konsisten.[30] Pemerintah sebagai pemimpin rakyat dalam satu negara yang demokrasi harus menyadari bahwa keberadaan mereka adalah karena dan untuk keberadaan bagi seluruh rakyat, dan bahwa mereka terpilih adalah karena melalui proses demokrasi dan tak dapat disangkali bahwa keterpilihan mereka untuk menjadi pemimpin negara pun pasti berkat andil yang besar dari rakyat yang pro demokrasi, sehingga tidaklah berlebihan bila rakyat pemilihnya mengharapkan mereka harus sangat peduli untuk menjaga api demokrasi ini selama pemerintahan mereka berlangsung, termasuk di dalamnya adalah demokrasi bagi rakyat untuk memilih keyakinan dan menjalankan keyakinan agamanya dalam nuansa kebebesan sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pun menjaminnya.

Menjadi sangat penting bagi Pemerintah untuk menjaga persatuan bangsa di tengah-tengah perbedaan, dengan memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara dalam beragama dan menjalankan ibadah keagamaannya dengan rasa aman tanpa terganggu oleh pihak-pihak lainnya. Memberikan sikap yang adil dalam menjalankan kepercayaan rakyat dan dalam menerapkan kebhinekatunggalikaan bangsa yang majemuk ini memang bukan perkara yang mudah, namun bukan berarti tidak mungkin, karena Pemerintah memegang kekuasaan dan memiliki otoritas dari rakyat.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekjen Kemenag Nifasri mengungkapkan, agenda moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 menjadi bagian dalam revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, namun dia menyadari belum adanya regulasi yang luas dan komprehensif mengenai moderasi beragama. Stafsus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menegaskan peran penting Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan moderasi beragama dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendorong implementasi moderasi beragama di daerah-daerah.[31] Perlu usaha keras dan tindakan kreatif yang nyata dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengembangkan dan menerapkan suatu sikap keberagaman yang sehat dan konstruktif di tengah berbagai ketegangan yang tercipta di tengah masyarakat selama ini demi membangun kembali kesatuan dan persatuan bangsa dalam sikap batin yang penuh persaudaraan sebagai sesama anak bangsa negeri ini.

Pemerintah yang telah memiliki legitimasi yang sah perlu juga memberikan aturan dan bimbingan yang tegas, terarah, dan konsisten dalam hal moderasi beragama terkait semangat membangun kembali kesatuan dan persatuan bangsa dalam sikap batin yang penuh persaudaraan sebagai sesama anak bangsa ini kepada para tokoh semua agama dan melibatkan semua tokoh agama dalam kelompok masyarakat terkecil di lingkungan RT di seluruh wilayah negeri ini. Dengan melibatkan para tokoh agama serta memberikan aturan dan bimbingan yang tegas, terarah, dan konsisten ini, diharapkan para tokoh agama ini mampu berdiri di garis depan dalam membendung dan menangkal penyebaran kejahatan kekerasan beragama dan intoleransi di masyarakat. Tokoh agama memiliki peran yang strategis bagi umat dalam menggerakkan moderasi beragama ini karena mereka adalah orang-orang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat luas. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin mengharapkan para tokoh agama mampu menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menggerakkan moderasi beragama ini, baik dalam

[30] Paristiyanti Nurwardani, Dkk, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016) 128.

[31] https://www.ksp.go.id/moderasi.

keyakinan dan pemahaman keagamaan maupun tindakan konkret dalam melakukan pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik, dan peran strategis ini perlu dituangkan dalam suatu kelembagaan.[32]

Setidaknya, ada dua faktor yang dapat menyatukan rasa kebersamaan. Pertama, adanya faktor sejarah, yakni persepsi yang sama tentang asal usul nenek moyang dan atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama yang disebabkan oleh penjajahan yang tidak hanya melahirkan solidaritas (sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika, yakni prinsip bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*), bersatu dalam perbedaan adalah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut negara, atau pemerintahan yang mereka pandang dan yakini mendatangkan kehidupan yang lebih manusiawi, tanpa menghilangkan keterikatan kepada suku bangsa, adat istiadat, ras atau agama,[33] masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang hidup dalam kepemilikan atas dua faktor yang sama ini seharusnyalah memiliki rasa persaudaraan yang kuat dan turut melaksanakan moderasi beragama ini. Seharusnyalah masyarakat bekerjasama melakukan usaha keras terbaik demi membangun kembali kesatuan dan persatuan bangsa dengan sikap batin yang penuh persaudaraan sebagai sesama anak bangsa negeri ini. Masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi langsung dengan sesamanya dalam lingkungan luas maupun terbatas dapat bertindak nyata dengan mulai membangun dan membina kembali hubungan yang harmonis, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama dalam lingkungannya.

Kasih Allah dalam Keberagaman Bermasyarakat: Refleksi Galatia 5:14

Dalam bagian ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimanakah implikasi kasih kepada sesama berdasarkan Galatia 5:14 dilakukan dalam moderasi beragama dalam merajut kembali kesatuan bangsa untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Di Indonesia jarang ditemukan sikap radikalisme yang berasal dari kelompok Kristen,[34] namun hal ini bukan sebagai legitimasi bahwa orang Kristen boleh hidup dengan berpangku tangan saja di negeri ini, justru orang Kristen harus tetap dan terus memberikan kontribusi yang nyata dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik terutama dalam hal menjalin kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama. Dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi umat Kristiani telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah Sang Juru Damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan, apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian diantaranya menggunakan kata

[32] https://www.ksp.go.id/moderasi.
[33] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) 44.
[34] Priyantoro Widodo dan Karnawati, *"Moderasi Agama"* 13.

kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan (mengampuni), kejujuran, keadilan, dan kebenaran.[35]

Kitab Galatia 5:13-26 merupakan teks Alkitab dalam Perjanjian Baru yang menceritakan tentang nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia supaya sungguh-sungguh hidup dalam kesalehan, karena kesalehan sebagai penangkal terbaik terhadap perangkap guru-guru palsu. Ada dua (2) hal yang ditekankan, yaitu: (1) agar mereka jangan bersitegang satu sama lain, melainkan saling mengasihi, dan (2) agar mereka semua harus berjuang melawan dosa.[36] Galatia 5:14, yang berbunyi: Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!", di ayat ini Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa kasih adalah ringkasan dari seluruh hukum Taurat. Taurat adalah sebuah hukum yang sangat ketat yang tidak memberi pengampunan bagi setiap orang Israel yang melanggarnya, seperti halnya kasih kepada Allah mencakup semua kewajiban dan hukum-hukumnya, demikian juga kasih kepada sesama kita mencakup semua kewajiban dan hukum-hukumnya. Bob Utley menjelaskan bahwa kebenaran firman Tuhan dalam ayat ini diungkapkan juga dalam Roma 13:8 dan Yakobus 2:8; ini adalah hukum sebagai kehendak Allah yang dinyatakan (Mat. 5:17-20), bukan sebuah sistem keselamatan kebenaran, ini adalah kutipan Imamat 19:18 dari Septuaginta yang juga digunakan Tuhan Yesus dalam Matius 5:43-48; 22:39, ini adalah kata kerja *perfect tense*, yang menekankan suatu puncak dari tindakan masa lalu yang menjadi status atau kondisi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dipahami sebagai: (1) ringkasan hukum; atau (2) suatu penggenapan hukum.[37]

Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang adalah perwujudan kasih Allah yang nyata dan yang nampak bagi mata manusia, dan ini merupakan penggenapan dari seluruh hukum Taurat (Mat. 5:17). Mulai dari datang hingga matinya Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus telah menggenapi seluruh isi hukum Taurat bukan bagi Diri-Nya, namun bagi seluruh umat manusia. Hukum baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah hukum yang telah mencakup seluruh hukum Taurat, yaitu Hukum Kasih. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia agar mereka mengasihi sesamanya manusia seperti diri mereka sendiri. Kasih yang dikatakan Rasul Paulus ini tidak hanya sebatas kepada sesama bangsa Israel, tetapi kepada sesama semua bangsa di dunia ini. Penekanan kasih kepada sesama manusia ini tidak bermaksud bahwa Rasul Paulus memisahkan antara kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kasih kepada Allah merupakan hukum terutama yang pertama, dan kasih kepada sesama manusia adalah hukum terutama yang kedua yang tidak terpisahkan (Mat. 22:39-40), bahkan Tuhan Yesus tegaskan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.

Dapat terlihat dalam Galatia 5:14 ini bahwa Rasul Paulus memandang bahwa kasih kepada sesama ini begitu penting, sebab kasih kepada sesama manusia ini merupakan buah dari keselamatan dan bukti nyata bahwa kita adalah milik Allah yang sudah ditebus-Nya dan dijadikan-Nya menjadi anak-anak-Nya yang mereprentasikan kasih Bapa di bumi ini. Nilai dari kasih inilah yang dalam kekristenan yang menjadi dasar bagi orang Kristen sangat menerima dan menjunjung tinggi Pancasila dijadikan sebagai dasar

[35] Kementerian Agama RI, *Moderasi* 30.
[36] Tafsiran Alkitab versi 1.3.5 oleh SABDA dan Tim Alkitab.
[37] Tafsiran Alkitab versi 1.3.5.

negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia bagi terciptanya toleransi dan kehidupan yang berdampingan dalam kasih, kerukunan, dan kedamaian, baik di masa lalu, untuk masa sekarang, dan bagi masa yang akan datang sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Dengan roh dan semangat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia inilah yang membuat umat Kristen di Indonesia dan di manapun, bahkan sampai ke ujung bumi, tidak akan pernah memulai merancangkant dan membuat keonaran atas nama agama. Dan bahkan umat tebusan Tuhan ini didorong untuk terlibat aktif dalam mem-bangun hidup yang cinta damai, persatuan, dan kesatuan dalam kasih kepada sesama di manapun mereka hidup menjadi warga negara. Semangat cinta damai, kesatuan, dan persatuan dalam membangun dan merajut kembali kesatuan dan persatuan bangsa ini diharapkan dapat menjadi pola dan keteladanan bagi semua saudara sesama anak bangsa.

Kesimpulan

Implikasi kasih kepada sesama berdasarkan Galatia 5:14 dilakukan dalam moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat multikultural yang rawan terjadi konflik merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus dilakukan demi merajut kembali kesatuan yang telah tercemar dan terpecah karena perilaku dan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Moderasi beragama dengan tujuan untuk meminimalisasi tindak kekerasan dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang merasa mayoritas atau superior terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang dianggap minoritas atau inferior tidak akan mungkin dapat diwujudkan tanpa disertai dengan pemberian kesadaran yang dapat memunculkan hati yang berbelas kasihan kepada sesamanya. Ajaran terkait kasih kepada sesama sekalipun merupakan ajaran pokok dalam kekristenan, namun tak dapat disangkal bahwa ajaran ini tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran agama manapun di dunia ini dan tidak akan pernah bertentangan dengan hukum dan aturan negara manapun di dunia ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama sekalipun sulit dilakukan dan akan menghadapi banyak tantangan, baik yang datang dari kelompok-kelompok yang cinta kekerasan dan intoleran, maupun yang datang dari pemimpin-pemimpin yang kurang memahami pentingnya nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang dalam membangun kesatuan dan persatuan di tengah keragaman bangsa yang majemuk ini, namun dengan memberikan kesadaran kepada semua pihak agar dapat menerapkan prinsip kasih kepada sesama dalam upaya melakukan moderasi beragama merupakan sebuah tindakan dan keputusan besar terbaik yang dapat ditindaklanjuti dalam praktek kehidupan bermasyarakat yang berguna untuk meminimalisasi kekerasan agama dan membangun kembali kesatuan yang telah terpecah, sehingga setiap anak bangsa di negeri ini dapat kembali hidup berdampingan dengan rasa aman dan tenteram, dan dapat memiliki rasa damai dalam menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.

Penerapan kasih Tuhan yang diajarkan Rasul Paulus berdasarkan Galatia 5:14 sebagai dasar dalam melaksanakan moderasi beragama dapat menjadi model dan pola dalam menurunkan tindak kekerasan dalam beragama pada masa mendatang, baik bagi warga gereja sebagai implementasi karakter Kristus maupun bagi umat beragama lainnya sebagai sesama manusia yang hidup dalam negara kesatuan Indonesia. Teladan kasih sebagai warga negara yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih

seharusnya dapat terimpartasi juga bagi masyarakat pada umumnya di Indonesia. Teladan kasih Tuhan dalam moderasi beragama diharapkan dapat merajut kembali kesatuan elemen bangsa yang sempat rusak guna membangun kehidupan dan harga diri bangsa tercinta ini.

Referensi

Alganih, Igneus. "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)" *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Arifin, Syamsul. Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer. Malang: UMM Press, 2009.

Bua, Piter Randan, David Samiyono, and Tony Christian Tampake. "Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif Dari Sila Kelima Pancasila." KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen) 5, no. 2 (2019): 109–124. http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/97/71.

Hartani, Mallia dan Nulhaqim, Soni Akhmad. "Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil" Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 2.

https://fasya.iain-samarinda.ac.id/indahnya-kehidupan-bermasyarakat-dengan-moderasi-beragama/ (1 Sept 2020).

https://febi.iain-samarinda.ac.id/2021/08/30/moderasi-beragama-dalam-bingkai-toleransi/.

https://www.kemhan.go.id/2019/03/16/menhan-pentingnya-menjaga-persatuan-dan-kesatuan-bangsa.html (16 Maret 2019).

https://www.ksp.go.id/moderasi-beragama-upaya-pemerintah-memperkuat-karakter-bangsa.html (4 Mei 2021).

https://lipipress.lipi.go.id › detailpost › moderasi-beragama/.

https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-negara-dalam-pembukaan-uud-1945-yang-wajib-diketahui-baca-selengkapnya-kln.html (6 Juli 2021).

https://www.tempo.co/tag/kemenkopolhukam (16 Desember 2020).

Isnaeni, Ahmad. "Kekerasan atas Nama Agama" KALAM Jurnal Faculty IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8, No. 2 (2014).

Kamus Alkitab versi 1.2.1 oleh SABDA dan Tim Alkitab.

Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Lay, Cornelis. "Kekerasan atas Nama Agama: Perspektif Politik" JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No. 1 (Juli 2009).

Nurwardani, Paristiyanti Dkk, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.

Siahaan, Harls Evan, Munatar Kause, and Fereddy Siagian. "Teologi Hospitalitas: Sebuah Diskursus Konstruktif Agama Merevitalisasi Nilai-Nilai Kemanusiaan." KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora 2, no. 2 (2022): 134–143.

Sunardi, St. Keselamatan, Kapitalisme, Kekerasan; Kesaksian atas Paradoks-paradoks. Yogyakarta: LkiS, 1996.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Utami, Winda Wana, and Darmaiza Darmaiza. "Hate Speech, Agama, Dan Kontestasi Politik Di Indonesia." Indonesian Journal of Religion and Society 2, no. 2 (2020): 113–128.

Widodo, Priyantoro dan Karnawati "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia" PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 15, No. 2 (2019).